

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah .

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dilakukan sebagai upaya menangani Pandemi Corona Virus Deciace (COVID) 19 yang melanda bangsa ini sehingga perangkat daerah melakukan rasionalisasi anggaran untuk dan di alihkan untuk menangani Pandemi Covid 19. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019–2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”,

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

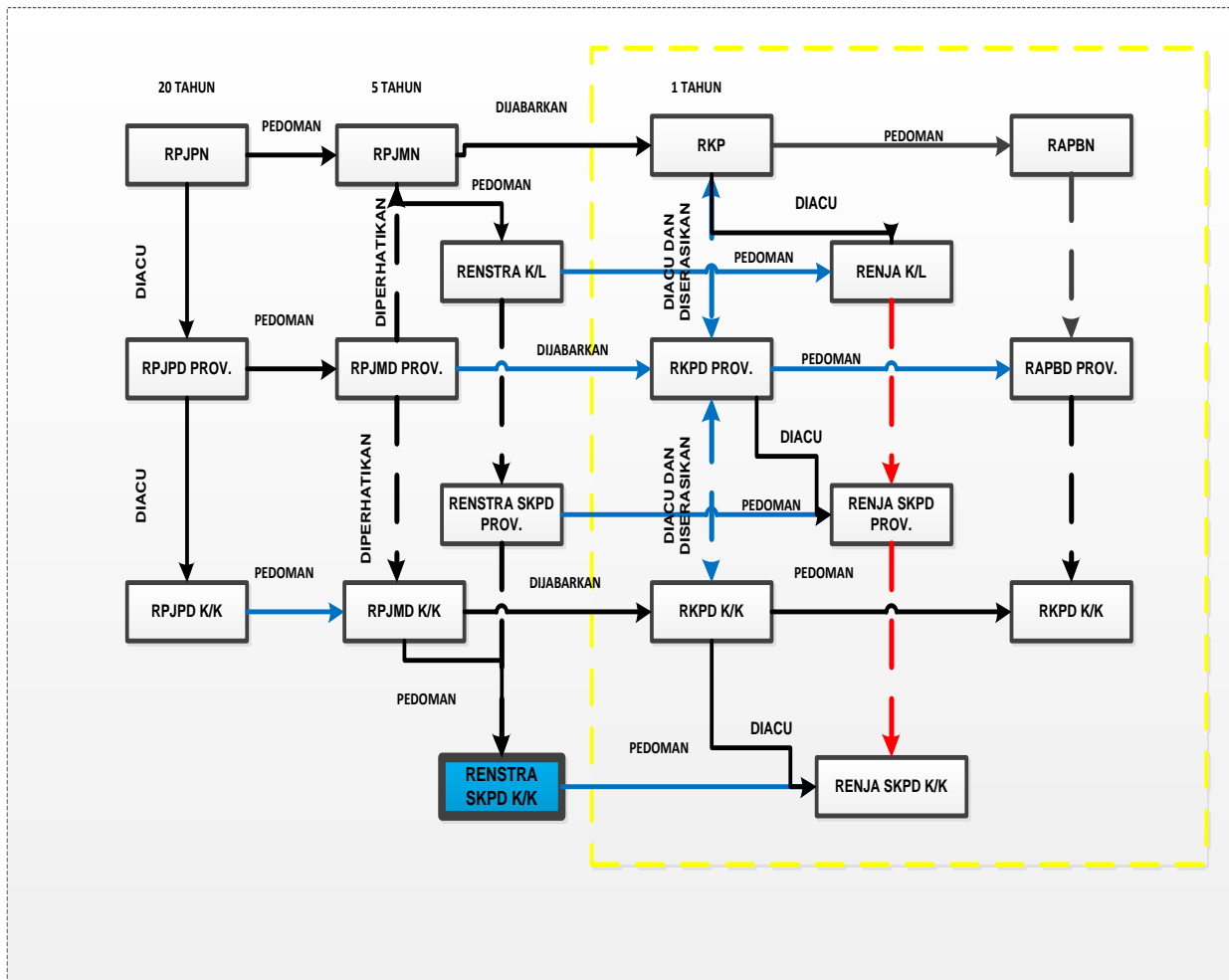
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 19);

- p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 36);
- q. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor);
- r. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2020

Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2020 anggaran (Belanja Tidak langsung & Belanja Langsung) sebelum perubahan sebesar Rp. 10.059.040.000 (Sebelum Perubahan) dan 3.448.472.000 (Setelah Perubahan) dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp.4.279.426.000 setelah perubahan Rp. 4.315.635.000 berkurang Rp. 36.209.000 (0,85 %)

- Belanja Langsung Rp. 5.779.614.000 setelah perubahan Rp. 3,448,472,000 berkurang Rp.2,331.142.000 (40.33%)

terdapat 12 program dan 45 kegiatan dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2020 realisasi belanja tidak langsung Rp. 1.715.076.210 (39.77%) dan belanja langsung Rp.752.155.961 (21.81%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai "*Pengarah*". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Program (Renstra OPD Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s. d triwulan II Tahun 2020 | | | Prakiraan Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan | |
|--------|--|--|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Realisasi Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) Target | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=(5+7) | 10= (10/4) |
| 5.2.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermaterai | 4,500 | 1,500 | 625 | 388 | 62.08 | 1,888 | 41.96 |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik | 60 | 12 | 12 | 6 | 50.00 | 18 | 30.00 |
| 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jaminan barang milik daerah (Asuransi) | 30 | 10 | 12 | 6 | 50.00 | 16 | 53.33 |
| 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 90 | 30 | 15 | 6 | 40.00 | 36 | 40.00 |
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan | 60 | 12 | 12 | 6 | 50.00 | 18 | 30.00 |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 60 | 12 | 12 | 6 | 50.00 | 18 | 30.00 |
| 09 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki | 432 | 108 | - | - | - | 108 | 25.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|-----|----|--------|-----|--------|
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 375 | 76 | 93 | 37 | 39.78 | 113 | 30.13 |
| | Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan | Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang undangan | 25 | 5 | 5 | 3 | 60.00 | 8 | 32.00 |
| 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 350 | 70 | 80 | 40 | 50.00 | 110 | 31.43 |
| 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100 | 8 | 30 | 5 | 16.67 | 13 | 13.00 |
| 19 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | terbayarnya honor belanja ATK, cetak penggandaan makan minum harian, rapat, tamu dan upah jasa pihak ketiga | 60 | 12 | 12 | 6 | 50.00 | 18 | 30.00 |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | - | |
| | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 40.00 |
| | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 45 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 13.33 |
| | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | 30 | 8 | 9 | 7 | 77.78 | 15 | 50.00 |
| | Pengadaan Meubileur | Jumlah meubileur yang diadakan | 115 | 7 | 70 | 22 | 31.43 | 29 | 25.22 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 100 | 100 | 100 | 70 | 70.00 | 170 | 170.00 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 75 | 15 | 15 | 9 | 60.00 | 24 | 32.00 |
| | Pengadaan Perlengkapan perlengkapan gedung kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala | 30 | 7 | 12 | 5 | 41.67 | 12 | 40.00 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara rutin/berkala | 35 | 5 | 20 | 4 | 20.00 | 9 | 25.71 |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Presentase capaian kinerja keuangan | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKjIP, Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD | 20 | 5 | 6 | 4 | 66.67 | 9 | 45.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|-----|----|-------|-----|--------|
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | 10 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 30.00 |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah | Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah | | | | | | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM | Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM | 40 | 8 | 4 | 2 | 50.00 | 10 | 25.00 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan | Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan | 40 | 8 | 4 | 2 | 50.00 | 10 | 25.00 |
| | Program Kerjasama Pembangunan | Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen SDGS | documen SDGs | 100 | 100 | 100 | 20 | 20.00 | 120 | 120.00 |
| | Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | | | | | | | |
| | Pengembangan Sistem Inovasi Daerah | Tersusunnya Data Informasi Potensi & Inovasi Daerah | 40 | 7 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 27.50 |
| | Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Riset & Teknologi | Terlaksananya peningkatan data dan publikasi riset dan teknologi | 20 | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 25.00 |
| | Program Perencanaan Pembangunan Strategis dan Cepat Tumbuh | Terwujudnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | | |
| | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD | Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD | 100 | 100 | - | 0 | - | 100 | 100.00 |
| | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW | Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW | 100 | 100 | 100 | 50 | 50.00 | 150 | 150.00 |
| | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar | | 100 | 100 | 50 | 50.00 | | |
| | Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen RP3M, RPJIM, One data dan Sistem Informasi | 15 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 40.00 |
| | Operasional PAMSIMAS | Dokumen Perencanaan Sanitasi | 100 | 100 | 100 | 55 | 55.00 | 155 | 155.00 |
| | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Tersedianya air minum dan sanitasi | 100 | 100 | 100 | 35 | 35.00 | 135 | 135.00 |
| | Koordinasi Penataan Ruang | Perda RTRW | 100 | | 100 | 35 | 35.00 | 35 | 35.00 |

| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|----|--------|-----|--------|
| | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terlaksananya musrenbang desa/kecamatan, Kabupaten/provinsi dan pusat | 35 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 14 | 40.00 |
| | Penetapan RKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD) | 15 | 6 | 4 | 4 | 100.00 | 10 | 66.67 |
| | Revisi RPJMD | Dokumen Ranwali RPJMD | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.00 |
| | Monitoring Evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monev | 20 | 6 | 6 | 3 | 50.00 | 9 | 45.00 |
| | Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah | tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 100.00 |
| | Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 20.00 |
| | Koordinasi penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi | Tersedianya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi | 100 | 100 | 100 | 50 | 50.00 | 150 | 150.00 |
| | Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) | Jumlah Aplikasi SIPD (Bangda) dan Aplikasi Simda Perencanaan (BPKP) yang dikembangkan dan dikelola | 100 | 100 | 100 | 50 | 50.00 | 150 | 150.00 |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi (simonev) | Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 33.33 |
| | Siergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Rencana Penerapan SPM, Pelaporan Penerapan SPM, Dokumen IKU dan IKK dan Pelaporan IKU dan IKK | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.00 | 125 | 125.00 |
| | Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP | Terlaksananya Asistensi RKA dan RKAP | 4 | 4 | - | 0 | - | 4 | 100.00 |
| | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|-----|----|--------|-----|--------|
| | Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi | Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi | 35 | 14 | 7 | 5 | 71.43 | 19 | 54.29 |
| | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Tersedianya laporan TPKD | 100 | 100 | 100 | 50 | 50.00 | 150 | 150.00 |
| | Program Perencanaan Sosial Budaya | Program Perencanaan Sosial Budaya | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Jumlah program program prioritas nasional dan daerah bidang sosial yang dilaksanakan | 40 | 16 | 7 | 4 | 57.14 | 20 | 50.00 |
| | Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya | Jumlah program program prioritas nasional dan daerah bidang budaya yang dilaksanakan | 35 | 14 | 5 | 4 | 80.00 | 18 | 51.43 |
| | Koordinasi dan Monev kawasan pedesaan prioritas nasional (KPPN) | Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional | 25 | 10 | 5 | 5 | 100.00 | 15 | 60.00 |
| | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri | | | | | | | |
| | Operasional Pendamping WISMP | Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif | 100 | 20 | 20 | 5 | 25.00 | 20 | 20.00 |
| | Program Perencanaan Tata Ruang | Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah | | | | | | | |
| | Revisi RTRW | Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah | 1 | - | - | 0 | - | - | 0.00 |

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2020 s.d Triwulan II menggambarkan target kinerja renstra.

2.2. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan

3. Unsur Pelaksana yaitu :

- a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Ekonomi & SDA, Sub Bidang Sosial dan Sub Bidang Budaya
- b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi & Informatika dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- d. Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Makro, Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.

3. Terbatasnya kemampuan aparaturnya Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu

kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnyakoordinasi, sinkronisasi komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan

3. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan

RPJMD 2018–2023, seperti Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijelaskan pada Bab. I diatas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

| Sasaran | Tujuan | Indikator |
|--|--|---|
| Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan | Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian,kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | Persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD) |
| Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | | Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan |

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2019

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bappelitbangda sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2020

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 terdiri dari :

Program/Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2020

| Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |
|---|--|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermaterai |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik |
| Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 yang terbayarkan. |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan jasa Administrasi keuangan |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor |
| Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah dan jenis Peralatan kerja yang diperbaiki |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi luar daerah |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran |
| Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan |
| Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan |
| Pengadaam Meubilleur | Jumlah meubilleur yang diadakan |

| | |
|---|---|
| Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharannya gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala |
| Pemeliharaan rutin/berkala Meubileur | Terpeliharannya Meubileur yang dipelihara rutin/berkala |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Tersusunnya dokumen/laporan rencana kegiatan,akuntabilitas kinerja dan keuangan. |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPD |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran |
| Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah | Persentase rencana implementasi kelitbanan |
| Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan | Fasilitasi, koordinasi Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan |
| Program Kerjasama Pembangunan | Terjalannya Kerjasama Pembangunan |
| Penyusunan Dokumen SDGs | Dokumen SDGs |
| Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA) | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah |
| Pengembangan sistim inovasi daerah | Jumlah hasil inovasi yang dihasilkan perangkat daerah |
| Peningkatan kapasitas data publikasi riset dan teknologi | Tersedianya data kelitbanan |
| Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Tersusunnya dokumen perencanaan yang berwawasan lingkungan |
| Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW | Dokumen KLHS RTRW |
| Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | Tersusunnya dokumen dan data infrastruktur wilayah |
| Koordinasi Infrastruktur dan pengembangan wilayah | Dokumen RP3M,RPIJM, dan one data |
| Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Dokumen perencanaan sanitasi |
| Operasional Pamsimas | Tersedianya akses air minum dan sanitasi |
| Koordinasi penataan ruang | Perda RTRW |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan yang bersinergi dan berkualitas |
| Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terselenggaranya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum OPD. Kabupaten, propinsi dan nasional |
| Penetapan RKPD | Dokumen RKPD pokok dan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah |

| | |
|---|---|
| Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Laporan realisasi fisik/keuangan program/kegiatan pokok dan perubahan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah |
| Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) | Jumlah aplikasi SIPD (bangda) dan aplikasi simda perencanaan (BPKP) yang dikembangkan dan dikelola |
| Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Jumlah dokumen rencana penerapan SPM, pelaporan penerapan SPM, dokumen IKU, dan IKK dan pelaporan IKU dan IKK |
| Koordinasi penusunan data DAK.APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi | Dokumen pengusulan program/kegiatan pusat dan daerah (aplikasi krisna dan simlaras Laporan pelaksanaan dak,apbd 1,apbn/phln,tp dan dekonsentrasi |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Terlaksananya program program nasional dan daerah |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi |
| Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Tersusunnya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah |
| Program Perencanaan Sosial Budaya | Terlaksananya program program nasional dan daerah |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Terlaksananya program program prioritas nasional dan daerah bidang social |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya | Terlaksananya program program prioritas nasional dan daerah bidang budaya |
| Koordinasi dan Monev kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) | Terlaksananya kegiatan fisik dn non fisik kawasan prioritas nasional |
| Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tersusunnya Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten |
| Operasional IPDMIP | Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten |
| | |
| | |

Tabel III

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020

Kabupaten Sidenreng Rappang

| Kode | | | | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun Anggaran 2020 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|---|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Penerima Manfaat | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Penerima Manfaat | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4 | 03 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Bappelitbangda | | | 1,177,082,400 | | Bappelitbangda | | 656,556,400 | |
| | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermaterai | | | 1550 Lbr | 6,600,000 | | | 625 Lbr | 3,750,000 | Lingkup Bidang Bappelitbangda |
| | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik | | | 12 Bulan | 84,000,000 | | | 12 Bulan | 74,400,000 | |
| | | | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu Penyediaan jaminan barang milik daerah | | | 12 Bulan | 11,490,000 | | | 12 Bulan | 11,490,000 | ASN Pengguna Kendaraan Dinas |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|-----------|-------------|--|--|-----------|------------|-------------------------------|
| | | | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | | 15 Unit | 4,980,000 | | | 15 Unit | 7,730,000 | ASN Pengguna Kendaraan Dinas |
| | | | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan | | 12 Bulan | 189,211,000 | | | 12 Bulan | 34,581,800 | |
| | | | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | | 12 Bulan | 26,719,500 | | | 12 Bulan | 26,719,500 | |
| | | | 09 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki | | 36 Unit | 14,314,000 | | | | | ASN Pengguna Peralatan Kantor |
| | | | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | 93 Buah | 4,109,000 | | | 93 Buah | 4,109,000 | |
| | | | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia | | 48 Lembar | 2,880,000 | | | 48 Lembar | 2,880,000 | |
| | | | 15 | Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan | Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang undangan yang disediakan | | 4 Eks | 5,040,000 | | | 5 Eks | 5,040,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| | | | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | 70 Kali | 316,358,900 | | | 80 Kali | 119,418,100 | |
| | | | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | 30 Kali | 3,000,000 | | | 30 Kali | 3,000,000 | |
| | | | 20 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran | | 12 Bulan | 508,380,000 | | | 12 Bulan | 363,438,000 | |
| | | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | Bappelitbangda | 100% | 421,023,000 | | Bappelitbangda | 100% | 445,492,000 | |
| | | | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | | 1 Unit | 4,071,000 | | | | | |
| | | | 07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | | 3 Unit | 19,575,000 | | | 4 Unit | 29,075,000 | |
| | | | 09 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | | 10 Unit | 87,971,000 | | | 9 Unit | 90,000,000 | |
| | | | 10 | Pengadaan Mebleur | Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan | | 55 Buah | 49,600,000 | | | 70 Buah | 86,900,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---|--|-----------------------|-----------|-------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| | | | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | | 1 Unit | 170,000,000 | | | 1 Unit | 128,737,000 | |
| | | | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | | 15 Unit | 74,036,000 | | | 15 Unit | 95,010,000 | |
| | | | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | | 12 Unit | 4,200,000 | | | 12 Unit | 4,200,000 | |
| | | | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | | 20 Unit | 11,570,000 | | | 20 Unit | 11,570,000 | |
| | | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Tersusunnya dokumen/laporan rencana kegiatan akuntabilitas kinerja & keuangan | Bappelitbangda | 8 Lap/Dok | 23,247,600 | | Bappelitbangda | 8 Lap/Dok | 22,247,600 | |
| | | | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKjIP, Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD | | 6 Lap/Dok | 17,237,600 | | | 6 Lap/Dok | 17,237,600 | Lintas Koordinasi Perangkat Daerah |
| | | | 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran | | 2 lap | 6,010,000 | | | 2 lap | 5,010,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|---|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| | | 15 | Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah | Persentase rencana implementasi kelitbanan | Bappelitbangda | 100% | 380,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 262,462,100 | |
| | | | 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah kegiatan kelitbanan bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd | | 4 Keg | 196,000,000 | | 4 Keg | 184,905,800 | Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait |
| | | | 02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM | Jumlah kegiatan kelitbanan bidang pemerintahan dan SDM yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd | | 4 Keg | 184,000,000 | | 4 Keg | 77,556,300 | Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait |
| | | 16 | Program Kerjasama Pembangunan | Cakupan pelaksanaan Kerjasama Pembangunan | Bappelitbangda | 100% | 55,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 35,000,000 | |
| | | | 04 | Penyusunan Dokumen SDGS | documen SDGS | | 1 Dok | 55,000,000 | | 1 Dok | 35,000,000 | |
| | | 16 | Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam | Bappelitbangda | 100% | 657,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 312,353,900 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| | | | | penerapan inovasi daerah | | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan Sistem Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah | | 8 Keg | 427,000,000 | | 8 Keg | 75,000,000 | Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait |
| | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Risert & Teknologi | Jumlah Risert dan Teknologi yang dihasilkan | | 4 Keg | 230,000,000 | | 4 Keg | 237,353,900 | Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait |
| | | 18 | | Program Perencanaan Pembangunan Strategis dan Cepat Tumbuh | Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berwawasan Lingkungan | Bappelitbangda | 100% | 313,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 294,338,500 |
| | | | 07 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD | Dokumen KLHS RPJMD | | 1 Dok | 250,000,000 | | 1 Dok | 250,000,000 | |
| | | | 08 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW | Dokumen KLHS RTRW | | 1 Dok | 63,000,000 | | 1 Dok | 44,338,500 | Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|---|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| | | 19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pen- gembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | Bappelitbangda | 100% | 800,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 550,300,000 | |
| | | 12 | Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen RP3M, RPJIM, One data dan Sistim Informasi | | 1 Dok, 2 SI | 470,000,000 | | | 1 Dok, 2 SI | 390,300,000 | Perangk at Daerah & Stakeho lder Terkait |
| | | 15 | Operasional PAMSIMAS | Dokumen RAD AMPL | | 1 Lap | 65,000,000 | | | 1 Lap | 35,000,000 | Perangk at Daerah & Stakeho lder Terkait |
| | | 17 | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Dokumen Perencanaan Sanitasi | | 1 Dok | 75,000,000 | | | 1 Dok | 50,000,000 | Perangk at Daerah & Stakeho lder Terkait |
| | | 01 | Koordinasi Penataan Ruang | Perda RTRW | | 1 Dok | 190,000,000 | | | 1 Dok | 75,000,000 | Perangk at Daerah & Stakeho lder Terkait |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | Bappelitbangda | 100% | 2,289,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 1,386,162,000 | |
| | | | | Persentase Kesesuaian Program/Kegiata n Yang Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiata n Yang Dianggarkan (APBD) | | 100% | | | | 100% | | |
| | | 3 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah , Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan Nasional | | 1 Do,6 Keg | 400,040,000 | | | 1 Do,6 Keg | 115,700,000 | Perangk at Daerah dan Stakeho lder terkait |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--------------|-------------|--|--|--------------|-------------|--|
| | | | 11 | Penetapan RKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah | | 3 Dok | 321,795,000 | | | 3 Dok | 362,462,000 | Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Sidrap |
| | | | 5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Program/kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidrap | | 6 Lap | 146,332,000 | | | 6 Lap | 75,000,000 | Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Sidrap |
| | | | 7 | Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) | Jumlah Aplikasi SIPD (Bangda) dan Aplikasi Simda Perencanaan (BPKP) yang dikembangkan dan dikelola | | 2 Sistem | 285,241,000 | | | 2 Sistem | 120,000,000 | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |
| | | | 8 | Koordinasi Penyusunan Data DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi | -Jumlah Dokumen pengusulan program/kegiatan pusat dan daerah (Aplikasi Krisna dan Simlaras) -Jumlah Laporan pelaksanaan DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi. | | 5 Dok, 1 Lap | 151,814,000 | | | 5 Dok, 1 Lap | 87,000,000 | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | 13 | Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi (Simonev) | Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan | | 4 Dok | 52,778,000 | | | 0 Dok | - | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |
| | | | | Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Jumlah Laporan Rencana Penerapan SPM, Pelaporan Penerapan SPM, Dokumen IKU dan IKK dan Pelaporan IKU dan IKK | | 3 Lap | 355,000,000 | | | 1 Lap | 50,000,000 | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |
| | | | | Revisi RPJMD | Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD periode 2018-2023 | | 1 Dok | 576,000,000 | | | 1 Dok | 576,000,000 | |
| | | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase kesesuaian kinerja bidang ekonomi | Bappelitbangda | 100% | 795,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 318,179,500 | |
| | | | 04 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi | Jumlah dokumen perencanaan pemabangunan bidang ekonomi yang diasilitasi | | 10 Dok | 300,000,000.00 | | | 10 Dok | 87,000,000 | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |
| | | | 11 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) | | 2 Lap | 445,000,000.00 | | | 1 Lap, 1 Apl | 191,179,500 | Perangkat Daerah Dan Stakeholder terkait |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| | | | 12 | Koordinasi Kerjasama TSLP/CSR | Jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR | | 17 L/P | 50,000,000.00 | | | 17 L/P | 40,000,000 | Perangkat Daerah Dan CSR |
| | | 23 | | Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya | Persentase kesesuaian kinerja bidang sosial dan budaya | Bappelitbangda | 100% | 200,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 159,000,000 | |
| | | | 10 | Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan | | 14 Dok | 78,000,000 | | | 14 Dok | 55,000,000 | Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait |
| | | | 11 | Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang budaya yang dilaksanakan | | 8 Dok | 70,000,000 | | | 8 Dok | 57,000,000 | Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait |
| | | | 12 | Koordinasi dan Monev kawasan pedesaan prioritas nasional (KPPN) | Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional | | 5 Keg | 52,000,000 | | | 5 Keg | 47,000,000 | Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait |
| | | 24 | | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tersusunnya Dokumen PSETK pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | Bappelitbangda | 100% | 400,000,000 | | Bappelitbangda | 100% | 325,265,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|--|---------------|----------|----------------------|--|
| | | | 06 | Operasional IPDMIP | Dokumen PSETK pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | Bappelitbangda | 50 PSETK | 400,000,000 | | | 20 PSETK | 325,265,000 | Perangk at Daerah dan Stakeho lder Terkait |
| | | | | JUMLAH | | | | 7,510,353,000 | | JUMLAH | | 4,767,357,000 | |

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

